



# **MENUJU PERHUBUNGAN DARAT DI MASA DEPAN**

**LAYANAN TRANSPORTASI DARAT YANG AMAN, SELAMAT,  
MUDAH DIJANGKAU, BERDAYA SAING DAN TERINTEGRASI 2020**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

# Visi



# Misi

# Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan R.I

## Visi

Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya-saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

## TUJUAN

1. Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi darat;
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia;
3. Perusahaan dan operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi;
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya;
5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan;
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

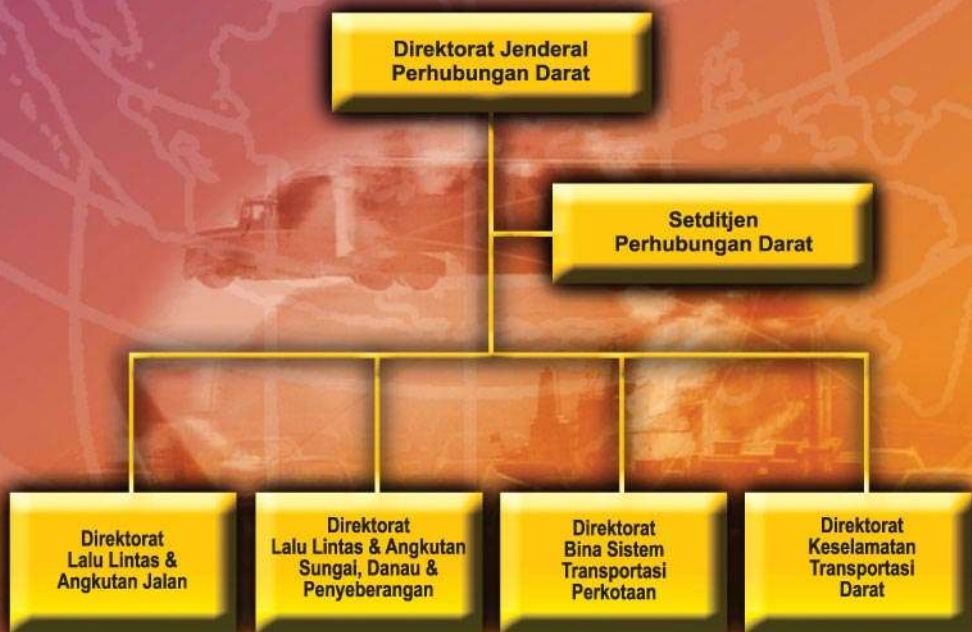
## Misi

1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
2. Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mendorong berkembangnya tata niaga dan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

## SASARAN

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip *good governance*
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana damai
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT



# **4 PILAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT**

**AMAN, SELAMAT dan MENJANGKAU  
PENDUDUK dan WILAYAH INDONESIA**

**BERKUALITAS, BERDAYA SAING dan  
BERKELANJUTAN**

**USAHA dan PENGUSAHAAN TRANSPORTASI  
DARAT yang TRANSPARAN dan AKUNTABEL**

**TERINTEGRASI dengan MODA LAIN**

## A. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### 1. Prasarana

#### a. Jaringan Jalan

Total panjang jalan di Indonesia adalah 330.495 km yang terdiri atas Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Kota dengan kondisi 23.6% baik, 37.1% sedang, 23.6% rusak ringan dan 15.8% rusak berat.

#### b. Terminal

Jumlah terminal type A yang ada di Indonesia saat ini berjumlah sebanyak 112 buah, sedangkan untuk type B dan C adalah sebanyak 270 buah terminal.

#### c. Jembatan Timbang

Jumlah jembatan timbang yang ada di Indonesia hingga tahun 2004 mencapai 127 buah.

### 2. Sarana

a. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia hingga tahun 2005 adalah sebanyak 47.664.826 buah untuk mobil penumpang berjumlah 7.484.175 buah, mobil beban 4.573.864 buah, bus 2.413.711 dan sepeda motor sebanyak 33.193.076 buah

b. Perkembangan jumlah bus AKAP di Indonesia hingga akhir tahun mengalami penurunan dibanding tahun 2004 yaitu 19.363 buah menjadi 19.253 buah pada tahun 2005

c. Jumlah angkutan pariwisata pada akhir tahun 2005 sebanyak 495 PO dengan jumlah bus sebanyak 7288 buah

### 3. Lalu Lintas

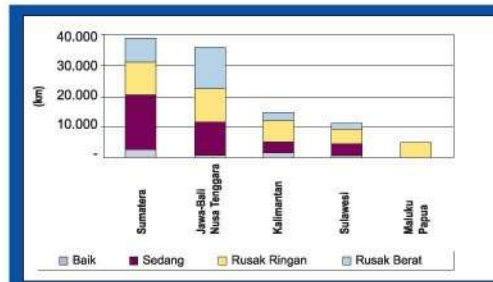
a. Hasil estimasi O/D perjalanan tahun 2001 diketahui jumlah perjalanan penumpang transportasi darat antar kabupaten/kota seluruh Indonesia yang terjadi dalam 1 tahun diperkirakan sebanyak 3,8 milyar perjalanan. Dari jumlah tersebut, perjalanan dalam pulau Jawa mendominasi sebesar 2,8 milyar perjalanan. Sedangkan untuk perjalanan penumpang antar propinsi (di luar perjalanan internal propinsi) adalah sebesar 1,2 milyar perjalanan/tahun.

b. Situasi dengan angkutan barang juga hampir sama, yaitu perjalanan darat antar kabupaten/kota secara keseluruhan sebesar 2,4 milyar ton/tahun yang didominasi oleh perjalanan di dalam pulau Jawa sebesar 1,8 milyar ton atau 75%. Sedangkan perjalanan barang antar propinsi (di luar perjalanan internal propinsi) sebesar 837 juta ton/tahun.

## Kondisi Jalan di Indonesia

Jenis Jalan	Panjang (km)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Jalan Nasional	26.866	64,3 %	24,0 %	6,9 %	4,8 %
Jalan Propinsi	37.164	34,1 %	32,1 %	16,9 %	16,9 %
Jalan Kabupaten	240.946	19,0 %	34,0 %	28,5 %	18,5 %
Jalan Kota	25.518	9,0 %	87,0 %	4,0 %	0,0 %
<b>Total</b>	<b>330.495</b>	<b>23,6 %</b>	<b>37,1 %</b>	<b>23,6 %</b>	<b>15,8 %</b>

## Grafik Kondisi Jalan di Indonesia



## Perkembangan Kendaraan Bermotor

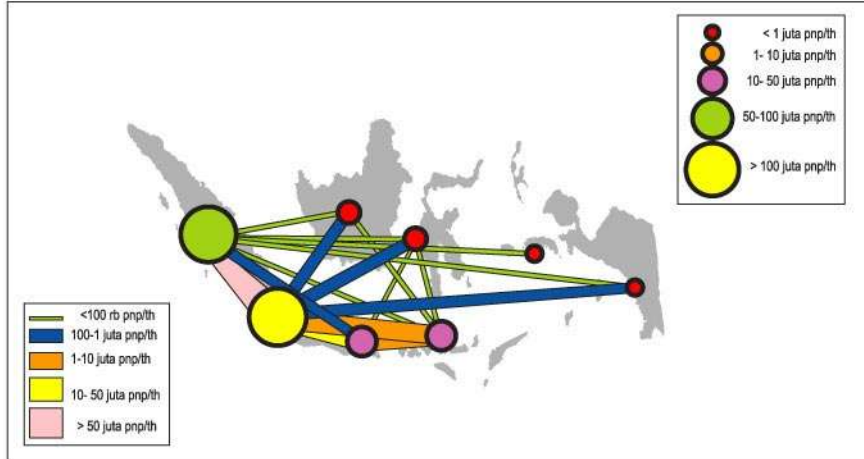
Jenis Ranmor	T A H U N				
	2001	2002	2003	2004	2005
M Penumpang	3.361.807	3.862.579	5.133.742	6.748.762	7.484.175
M. Jalan	1.759.747	2.015.347	3.058.218	4.260.889	4.573.864
M. Bus	687.570	731.990	1.270.020	2.013.376	2.413.711
Spd.Motor	15.492.148	18.061.414	23.312.945	28.963.987	33.193.076
<b>Jumlah</b>	<b>21.201.272</b>	<b>24.671.330</b>	<b>32.774.924</b>	<b>41.986.814</b>	<b>47.664.826</b>

## Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2001-2005

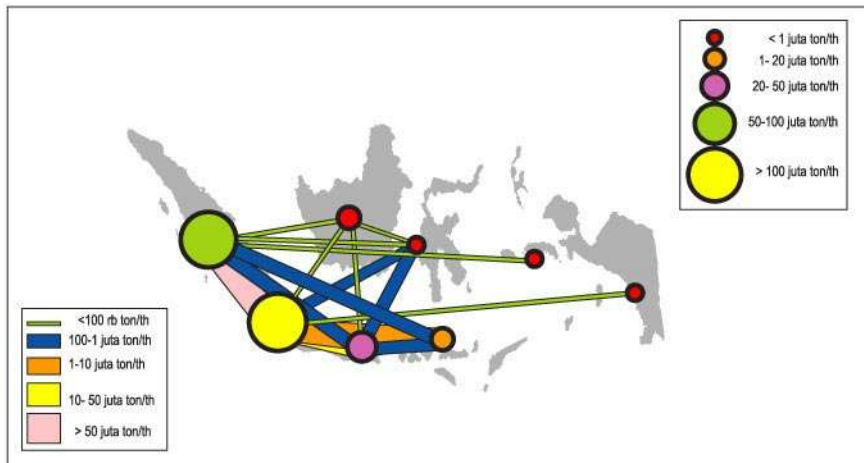




### Pola O-D Penumpang Antar Pulau Tahun 2001 (Pnp/thn)



### Estimasi O-D Barang Antar Pulau Tahun 2001(ton/thn)



## B. Bidang Angkutan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

### 1. Prasarana

#### a. Alur Pelayaran Sungai, Danau

Jumlah Alur Pelayaran Sungai, Danau yang ada di Indonesia sebanyak 214 buah dengan total panjang 34.342 km yang bisa dilayari navigasi 23.255 km untuk sungai. Danau sebanyak 27 buah dengan luas total 3.737 km<sup>2</sup>.

#### b. Lintas Penyeberangan

Jumlah lintas penyeberangan yang telah ditetapkan dengan KM Menteri Perhubungan sampai dengan 2005 sebagaimana terakhir ditetapkan dalam KM Perhubungan No. 38 tahun 2005 sebanyak 182 lintas.

#### c. Lintasan Komersil

Jumlah lintasan komersil sebanyak 36 lintas.

#### d. Lintas Perintis yang di subsidi

Lintas penyeberangan yang disubsidi tahun 2005 terdiri dari 65 lintas penyeberangan (57 lintas dalam propinsi dan 8 lintas antar propinsi).

#### e. Pelabuhan

Jumlah pelabuhan penyeberangan di Indonesia pada tahun 2005 sebanyak 128 buah.

### 2. Sarana

#### a. Jumlah Kapal SDP yang beroperasi

Jumlah kapal SDP yang beroperasi pada tahun 2005 sebanyak 191 kapal terdiri dari : Kapal Ro-Ro 168 unit, Kapal LCT 4 unit, Kapal Cepat penumpang 14 unit dan truk air 5 unit.

#### b. Jumlah Kapal berdasarkan kepemilikan (Tahun 2005)

PT. ASDP Persero sebanyak 90 unit, Kerjasama PT. ASDP dengan Swasta sebanyak 2 unit, dan Swasta sebanyak 99 unit.

### 3. Lalu Lintas

#### a. Produksi Penumpang ASDP

Produksi ASDP selama tahun 2004 mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2003; untuk angkutan penumpang jumlah produksinya sebesar 39.053.054 orang dibanding tahun 2003 sebesar 37.649.113 orang.

#### b. Produksi Angkutan Kendaraan R-4

Produksi angkutan kendaraan R-4 tahun 2004 adalah sebesar 5.986.634

#### c. Produksi Angkutan Barang

Produksi angkutan barang tahun 2004 sebesar 18.245.704 ton.



### Jumlah Pelabuhan Berdasarkan Penyelenggara

No.	Penyelenggara	Jumlah
a.	PT. ASDP Indonesia Ferry (persero)	35
b.	Dinas Perhubungan	66
c.	Belum ditetapkan	24
d.	UPT Ditjen Hutbat	3
Jumlah		128

### Jumlah Kapal SDP Yang Beroperasi

No.	Jenis Kapal	Jumlah (unit)
a.	Kapal Ro - Ro	168
b.	Kapal LCT	4
c.	Kapal Cepat penumpang	14
d.	Truk Air	5
Jumlah		191

### Produksi Angkutan SDP

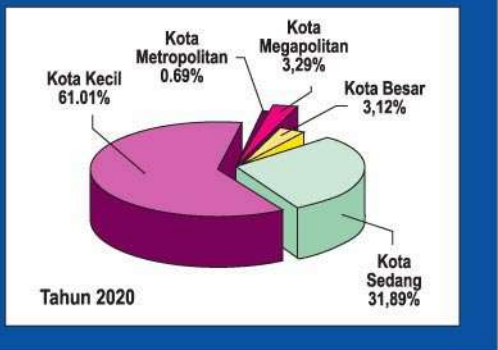
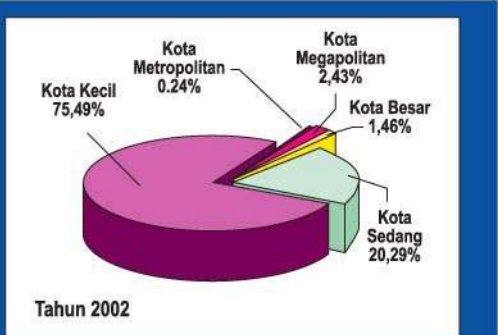
Tahun	Penumpang (orang)	Kendaraan R-4 (unit)	Barang (ton)
1997	44.584.410	5.538.756	13.061.957
1998	45.497.675	5.740.816	12.790.414
1999	42.852.763	5.900.575	13.120.299
2000	40.538.869	6.546.288	14.803.719
2001	34.197.063	6.130.548	14.371.231
2002	39.555.313	6.313.494	15.256.944
2003	37.649.113	5.903.365	17.039.805
2004	39.053.054	5.986.634	18.245.704



### C. Bidang Perkotaan

Prasarana transportasi di perkotaan di Indonesia masih didominasi jaringan jalan daripada rel. Aktifitas lalu lintas di wilayah perkotaan masih di dominasi sepeda motor (sekitar 142 milyar kend-km pertahun). Lama perjalanan di beberapa kota di Indonesia mempunyai batas waktu kurang dari 60 menit.

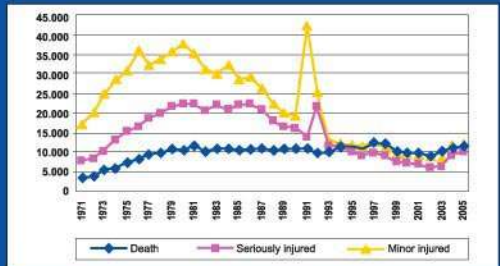
Kota-kota di Indonesia diklasifikasikan dengan mendasarkan pada jumlah penduduknya, yaitu kota megapolitan > 5 juta jiwa, kota metropolitan 1-5 juta jiwa, kota besar 0,5-1 juta jiwa, kota sedang 0,1-0,5 juta jiwa dan kota kecil 0,02-0,1 juta jiwa. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka jumlah kota di Indonesia adalah 412 kota. Diperkirakan pada tahun 2020 jumlah tersebut secara total akan bertambah menjadi 577 kota. Komposisi jumlah kota pada tahun 2002 dan tahun 2020 dapat dilihat dalam gambar berikut:



### D. Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Angka kecelakaan lalu lintas jalan raya di Indonesia saat ini masih cukup tinggi, sebagaimana dilaporkan oleh Polisi Republik Indonesia dengan lebih-kurang 60 (enam puluh) korban kecelakaan setiap harinya. Dari jumlah korban ini, 24 (dua puluh empat) orang di antaranya meninggal dunia. Angka ini tergolong relatif tinggi untuk tingkat ASEAN, di mana 112 orang meninggal dunia setiap harinya akibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat keselamatan di jalan.

Grafik Perkembangan Fatalitas Kecelakaan Tahun 1971-2005



Dari grafik diatas terlihat bahwa rata-rata korban meninggal, luka parah dan luka ringan tahun 2005 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2004.



## ISSUE STRATEGIS

### Keselamatan Transportasi

Angka Kecelakaan lalu lintas jalan raya di Indonesia masih cukup tinggi sekitar 60 korban kecelakaan lalu lintas perhari.

### Desentralisasi dan Tata Pemerintahan

Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik tergantung pada kemampuan untuk menggunakan kekuasaan dan mengambil keputusan sepanjang waktu, dalam spektrum ekonomi, sosial, lingkungan dan sektor-sektor lain.

### Muatan Lebih

Kondisi muatan lebih banyak terjadi pada prasarana jalan, yang mengakibatkan kerusakan jalan, dan berdampak pada: meningkatnya BOK dan berkurangnya kecepatan.

### Peran Dalam Pembiayaan Infrastruktur

Partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur diharapkan menjadi komponen penting untuk keberlanjutan infrastruktur, berbentuk privatisasi atau kerjasama (partnership).

### Persaingan dan Integrasi Antar Moda

Terjadinya persaingan sudah selayaknya perlu untuk dipertimbangkan dalam hal klasifikasi layanan (keunggulan-karakteristik) yang diberikan kepada masyarakat. Sinergi integritas antar moda perlu difasilitasi (infrastruktur) yang memadai untuk memaksimalkan transportasi dalam melancarkan distribusi orang maupun barang.

### Tuntutan SDM Berkualitas di Bidang Transportasi Darat

Rendahnya tingkat pendidikan formal SDM berakibat kurangnya kemampuan dalam mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan eksternal yang semakin kompleks dan cepat.



## Kebijakan Pembangunan Transportasi Darat

1. Mendorong penggunaan angkutan massal untuk menggantikan kendaraan pribadi di perkantoran sebagai pelaksana pembatasan kendaraan pribadi.
2. Mendorong penyusunan standar kompetensi untuk SDM transportasi darat.
3. Mendorong penggunaan teknologi dalam pengembangan transportasi darat di wilayah rawan bencana.
4. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi darat yang sinergis dengan rencana transportasi nasional sehingga mampu mengatasi permasalahan transportasi di daerahnya.
5. Mendorong dan memfasilitasi perubahan tata niaga transportasi darat menuju sistem tender trayek.
6. Menyusun regulasi yang memberikan kepastian dan ketetapan hukum tata niaga transportasi.

## Kebijakan Operasional Transportasi Darat

### A. Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan.
2. Peningkatan Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Jalan.
3. Peningkatan Kinerja Peraturan dan Kelembagaan, Pembinaan Teknis.
4. Peningkatan Profesionalisme SDM.
5. Penetapan lintas strategis untuk mengakomodasi kelancaran mobilitas angkutan barang dan jasa di jalan nasional.

### B. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP)

1. Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi SDP.
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi SDP yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3. Meningkatkan daya saing pelayanan transportasi SDP sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya.
4. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan.
5. Peningkatan perkembangan tata niaga dan industri transportasi SDP yang transparan dan akuntabel.

### C. Transportasi Perkotaan

1. Pemulihan kondisi pelayanan armada bus kota sesuai SPM.
2. Pengembangan angkutan perkotaan pemaduan kawasan dan sistem transportasi perkotaan.
3. Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan terutama penggunaan transportasi umum massal.



**Usaha Pemerintah dalam menarik peran swasta di bidang Transportasi Darat**

1. Merevisi UU Jalan (UU No.14/1992 dan PP. 44/1993) dalam memberikan perlakuan yang sama antara kendaraan umum dan kendaraan pribadi, memberikan kesempatan sektor swasta untuk partisipasi dalam hal pengawasan kendaraan dan pemberian ijin kepada masyarakat dan perbengkelan.
2. Kebijakan tarif komersil untuk kelas bisnis dan eksekutif diserahkan kepada mekanisme pasar (operator).
3. Rute angkutan perintis yang sudah menguntungkan diserahkan dan diatur perusahaan swasta.
4. Dimasa depan pembangunan infrastruktur transportasi darat yang memberikan manfaat secara ekonomi yang baik dimungkinkan untuk diatur oleh sektor swasta (contoh : pembangunan pelabuhan Margagiri Ketapang).

**Program Infrastruktur Strategi Bidang Transportasi Darat**

No.	Nama Kegiatan	Perkiraan Biaya	Sumber Dana
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Margagiri Ketapang	US\$ 46.3 Juta	Pemerintah Swasta
2.	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	US\$ 54.34 Juta	Pemerintah
3.	Pembangunan Rute Lintas Penyeberangan Nasional di Jakarta-Pontianak, Surabaya-Makasar, Wahai-Babang, Petani-Sorong, Kendari Ambon dari Ambon Sorong	US\$ 76.07 Juta	Pemerintah BUMN

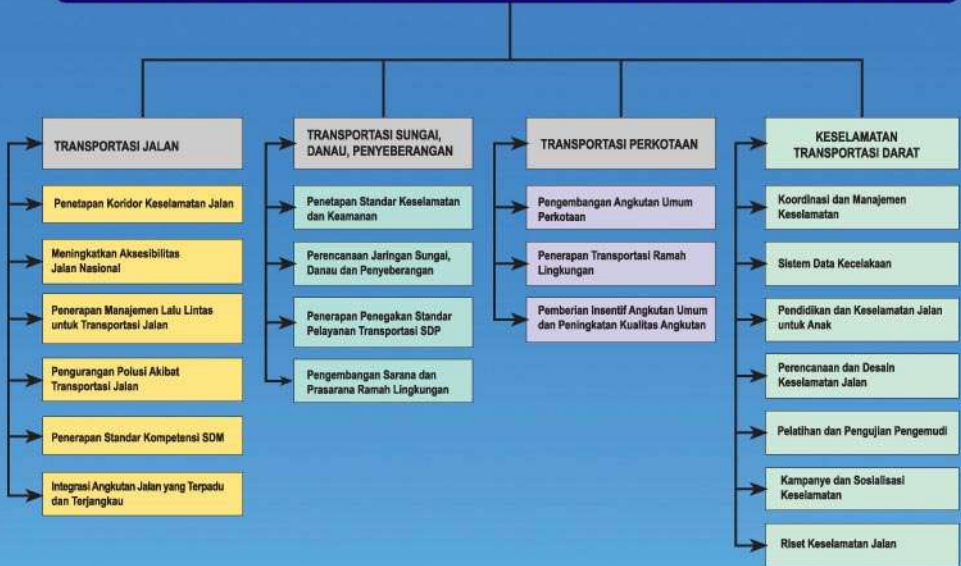
**Proyek Strategis bagi Swasta untuk berpartisipasi di bidang Transportasi Darat**

1. Sistem Angkutan Massal Perkotaan (MRT) di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan
2. Terminal Bus Terpadu
3. Pembangunan Jembatan Timbang
4. Pengembangan Bus Rapid Transit di kota-kota besar di Indonesia
5. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
6. Penggunaan Energi Alternatif sebagai Bahan Bakar Kendaraan

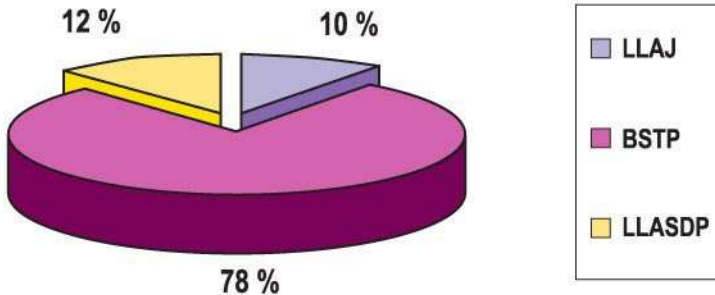




## RENCANA INVESTASI TRANSPORTASI DARAT (2005-2024)



### Proporsi Pendanaan Sub Sektor Transportasi Darat



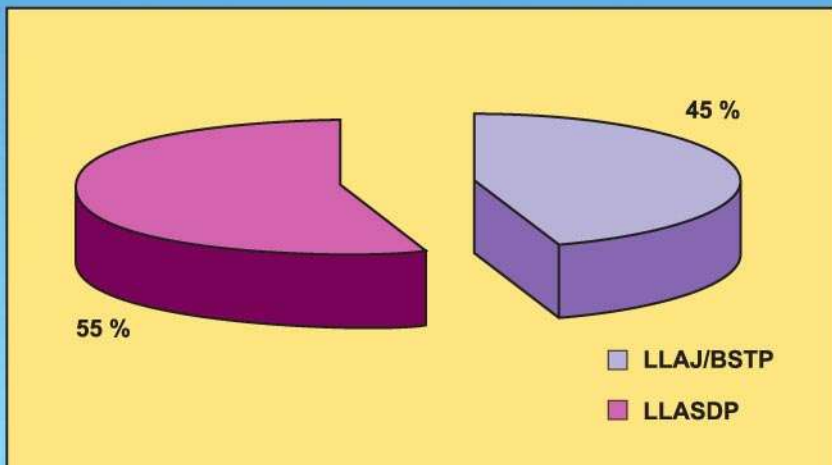
Estimasi Kebutuhan Investasi : Rp. 91.710.000.000.000



## Anggaran Pembangunan TA 2006

No	Program	Pagu
1.	Bidang LLAJ / Perkotaan	Rp. 325.274.787,-
2.	Bidang LLASDP	Rp. 401.453.677,-
	<b>Total Kebutuhan Anggaran Ditjen Hubdat</b>	<b>Rp. 726.728.469,-</b>

## Proporsi Anggaran TA 2006 Transportasi Darat



# TRANSPORTASI DARAT DI MASA DEPAN

## Pertumbuhan Transportasi Darat (2000-2020)

- Angkutan Jalan (%) : 5.84 %
- Angkutan Penyeberangan (%) : 4.36 %

## Prediksi Perjalanan Transportasi Darat di Tahun 2020

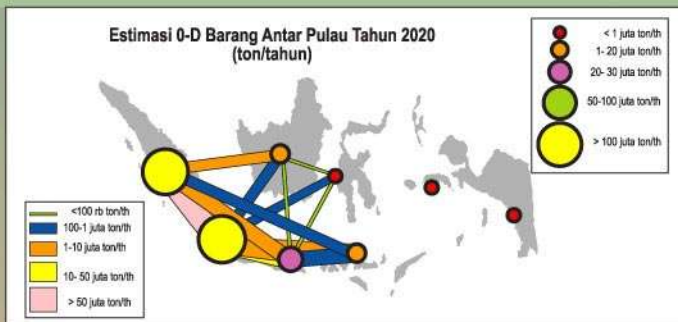
- Jumlah Perjalanan Penumpang : 666.252.499 penumpang / tahun
- Jumlah Perjalanan Barang : 780.107.850 ton / tahun

## Prediksi Pergerakan Penumpang dan Barang Masa Depan (Tahun 2020)

### Estimasi Pergerakan Penumpang Tahun 2020



### Estimasi Pergerakan Barang Tahun 2020







**Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
Departemen Perhubungan**

**Gedung Karsa Lantai 3, Jl. Merdeka Barat No. 8  
Jakarta Pusat - Indonesia  
Tel. (62-21) 3503013  
[www.hubdat.go.id](http://www.hubdat.go.id)**